
BLINDENINSTITUUT BANDUNG: SEKOLAH PERTAMA UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DI HINDIA-BELANDA

Rifai Shodiq Fathoni

Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
rifai.sf@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pendidikan paling awal bagi penyandang disabilitas pada masa kolonial khususnya penyandang tunanetra yang berada di Blindeninstituut Bandung. Pokok permasalahan penelitian ini adalah mengapa muncul usaha untuk mendidik penyandang tunanetra di Blindeninstituut. Penelitian menggunakan metode sejarah meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Kemunculan Blindeninstituut Bandung merupakan jawaban untuk masalah kebutaan di Jawa yang mengakibatkan banyak penyandang tunanetra berusia produktif menggantungkan hidupnya sebagai pengemis. Di sisi lain, pemerintah kolonial dalam setiap kebijakannya kurang memberikan porsi yang cukup untuk penyandang disabilitas. Melalui inovasi sosial yang dihadirkan Blindeninstituut, para penyandang tunanetra dididik dan dilatih menjadi manusia mandiri dan memiliki masa depan. Kehadiran Blindeninstituut yang didanai oleh donatur swasta, seperti loji masonik, menjadi bukti bahwa kesadaran terhadap hak penyandang disabilitas telah muncul di masyarakat sejak masa kolonial.

Kata kunci: *Blindeninstituut; disabilitas; inovasi sosial; kolonial; sejarah sosial*

BLINDENINSTITUUT BANDUNG: THE FIRST SCHOOL FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE DUTCH EAST INDIES

Abstract

This study aims to explore the earliest education for people with disabilities during the colonial period, specifically focusing on the blind at Blindeninstituut Bandung. The primary issue addressed in this research is the reason behind the attempt to educate the blind during the colonial period. The research employs historical methods, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The emergence of Blindeninstituut Bandung serves as a response to the problem of blindness in Java, which resulted in many visually impaired individuals of working age having to depend on begging to sustain their lives. On the other hand, the colonial government, through its policies, failed to allocate sufficient resources for people with disabilities. Through the social innovations introduced by Blindeninstituut, blind individuals are educated and trained to become independent individuals and secure a future for themselves. The presence of Blindeninstituut, which is funded by private donors, such as the masonic lodge, serves as evidence that societal awareness of the rights of people with disabilities had emerged during the colonial period.

Keywords: *Blindeninstituut; disability; colonial; social history; social innovation*

Naskah masuk: 15-01-2023; Revisi akhir: 06-05-2023; Disetujui terbit: 15-05-2023

I. PENDAHULUAN

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa muncul upaya untuk menghadirkan pendidikan bagi penyandang disabilitas (penyandang tunanetra) pada masa kolonial? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kehidupan para penyandang tunanetra dan pendidikan untuk penyandang disabilitas di Blindeninstituut Bandung.

Dewasa ini disabilitas menjadi salah satu isu penting di Indonesia. Kemunculan isu tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas. Sejak kemerdekaan pemerintah Indonesia beberapa kali mengeluarkan peraturan terkait tentang penyandang disabilitas (ILO, 2013). Tujuannya untuk mengakomodasi kelompok minoritas terbesar di Indonesia ini. Pertanyaan pun muncul, mengapa dan sejak kapan kesadaran untuk memenuhi hak penyandang disabilitas ini muncul?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kajian sejarah tentang penyandang disabilitas dibutuhkan. Sayangnya kajian tentang sejarah penyandang disabilitas masih sangat terbatas dalam historiografi Indonesia, khususnya pada masa kolonial. Kajian-kajian yang ada pada umumnya membahas tentang institusi disabilitas pada masa kemerdekaan, kebijakan Pemerintah Indonesia, atau pun tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas pada masa kemerdekaan. Berdasarkan realitas ini, terdapat kekosongan di dalam historiografi Indonesia yang harus dilengkapi.

Ada pun kajian tentang penyandang disabilitas masa kolonial didominasi oleh kajian tentang penyandang disabilitas mental. Hans Pols (2006) dalam artikelnya "*The Development of Psychiatry in Indonesia: from Colonial to Modern Times*" mencoba mengawali eksplorasi terhadap penyandang disabilitas masa kolonial. Dalam artikelnya, ia mengulas tentang kemunculan psikiater dan penanganan penyandang disabilitas mental pada masa kolonial. Masih terkait disabilitas mental, Nathan Porath (2008) dalam artikelnya berjudul "*The Naturalization of Psychiatry in Indonesia and its Interaction with Indigenous Therapeutics*", memaparkan penanganan terhadap orang-orang yang mengalami gangguan jiwa di Hindia Belanda. Pada tahun 2014, Peter Carey memublikasikan artikel berjudul "*A Mischievous Young Rogue and a Dwarf: Reflections on the Role of the Panakawan in the Age of Prince Diponegoro (1785-1855)*". Di dalam artikel itu, ia memaparkan eksistensi *palawija* di sekitar keraton yang dianggap memiliki kesaktian. Jadi di dalam lingkungan keraton, penyandang disabilitas tidak selalu dianggap sebagai orang sakit atau simbol kutukan, melainkan individu yang memiliki kesaktian dan kebijaksanaan.

Di Hindia-Belanda (kini Indonesia), penyandang disabilitas telah dikenal sejak sebelum masa kolonial. Akan tetapi, mereka tidak dipandang layaknya manusia pada umumnya, melainkan sebagai simbol dosa (Pelka, 2012). Stigma ini menjadikan mereka sering dikucilkan dari masyarakat. Setelah pengaruh kolonial masuk, penyandang disabilitas dianggap sebagai beban sosial. Untuk menyingkirkan mereka dari struktur masyarakat, label sebagai "orang tidak berguna, simbol kemalasan (De Preanger Bode, 12 Oktober 1905) dan orang sakit" pun mulai disematkan kepada mereka. Pelabelan tersebut akhirnya memaksa penyandang disabilitas untuk mau ditempatkan di panti sosial dan rumah sakit jiwa. Peter Conrad dalam "*Medicalization*

and Social Control” (1992) menjelaskan institusionalisasi terhadap penyandang disabilitas dapat digunakan untuk melegitimasi kontrol sosial terhadap kelompok ini

Sementara, Michael J. Oliver (1999), menganggap pemisahan penyandang disabilitas dari masyarakat umum tidak dapat dilepaskan dari gelombang kapitalisme yang muncul. Menurutnya, semua fenomena termasuk munculnya kategori sosial dihasilkan oleh kekuatan kapitalisme. Dengan kata lain kategori “orang cacat” juga diproduksi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial ini. Melalui program isolasi dan institusionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, posisi penyandang disabilitas menjadi terdesak dan terkucilkan dari masyarakat umum. Pada tahun 1901, Blindeninstituut muncul menawarkan inovasi sosial baru untuk penyandang disabilitas. Menurut lembaga itu, penyandang disabilitas seharusnya memperoleh kesempatan untuk hidup dan menentukan masa depan mereka. Pendidikan pun dijadikan jalan memperbaiki nasib penyandang tunanetra. Metode pendidikan yang diterapkan oleh Blindeninstituut bisa dikatakan sebagai inovasi sosial pada masanya. Eduardo Pol dan Simon Philip (2009) menjelaskan bahwa sebuah inovasi dapat dikatakan sebagai inovasi sosial apabila gagasan baru yang dimunculkan berpotensi untuk meningkatkan kualitas atau kuantitas kehidupan.

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan yang terakhir adalah penulisan sejarah (historiografi). Dalam penelitian ini penulis lebih dominan menggunakan sumber tertulis dan foto. Periode tahun yang terlalu lampau, menjadi salah satu pertimbangan mengapa penulis lebih banyak menggunakan sumber tertulis. Untuk sumber tertulis, ada beberapa sumber primer yang berhasil dihimpun. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai lokasi.

Beberapa sumber primer yang digunakan seperti *Het Blideninstituut en De Werkinrichting Voor Blinde Inlanders te Bandoeng*; *Jaarverslag der Vereeniging tot verbetering van het Lot der Blinden in Nederlandsch-Oost-Indië*; *Koloniaal Verslag; Volkstelling 1930; Onderzoek naar de mindere welvaart der Inlandsche bevolking op Java en Madoera*; *Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*; diperoleh dari Delpher, ANRI, dan Perpustakaan Nasional di Republik Indonesia. Sumber-sumber primer itu kemudian ditunjang oleh arsip foto yang diperoleh dari KITLV dan berita-berita di surat kabar atau majalan sezaman seperti *Het Nieuws van Den Dag*, *De Preanger Bode*, *De Locomotief*, *De Telegraaf*, *De Indische Courant*, *Soerabaiasch-Handesblad*.

II. PEMBAHASAN

Sebelum abad ke-20, tidak ada lembaga yang secara khusus bergerak memperjuangkan hak penyandang disabilitas di Hindia-Belanda. Kelompok ini selama hidupnya selalu dihantui diskriminasi sosial, sehingga mengakibatkan hidup mereka menjadi semakin sulit. Bagian ini membahas persoalan yang dihadapi penyandang tunanetra di Hindia Belanda, gagasan tentang pendidikan untuk penyandang tunanetra, dan eksistensi *Blindeninsituut* sebagai lembaga pendidikan pertama bagi penyandang tunanetra Hindia-Belanda.

A. Kehidupan Penyandang Disabilitas (Penyandang Tunanetra) di Hindia-Belanda

Menjelang abad ke-20, jumlah penyandang tunanetra yang terdapat di Hindia-Belanda tidaklah sedikit. Menurut survei dokter mata, Leo Steiner (1894), diperkirakan terdapat 125.000 penyandang tunanetra di Jawa saja. Kebutaan tersebut kebanyakan disebabkan oleh penyakit trakom yang menjadi epidemi di Jawa pada akhir abad ke-19. Lingkungan tidak bersih dan kurangnya fasilitas sanitasi menjadi penyebab utama munculnya penyakit ini (Rivai, 1905). Selain trakom, penyakit gonorea juga menjadi penyebab kebutaan lainnya. Berbeda dengan trakom yang banyak menyerang penduduk kelas bawah, gonorea menyerang hampir semua kalangan.

Steiner berpendapat tingginya angka kebutaan saat itu sebenarnya bisa diatasi jika terdapat dokter mata dan fasilitas yang memadai. Sayangnya, rumah sakit mata pertama baru diresmikan pada 1909. Sebelumnya pemerintah lebih memilih menempatkan penyandang tunanetra di panti sosial. Sementara hingga tahun 1940, dokter mata yang tersedia di Jawa hanya berjumlah 25 orang (Houwer, 1940).

Selain masalah kesehatan yang menyebabkan kebutaan menjadi sulit dihindari. Persoalan ekonomi juga dihadapi oleh para penyandang tunanetra. Di lingkungan kerja, kehidupan mereka dipersulit oleh diskriminasi dari lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Sering kali mereka dilabeli sebagai orang sakit atau simbol dari dosa pendahulu mereka (Mensch, 1937).

Menurut laporan anggota *Blindenbond*, *Leydesdorff van Praag* (1942), sebagian (penyandang tunanetra) yang hidup di pedesaan banyak menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai petani. Laporan ini sejalan dengan laporan *Volkstelling* (1930), yang menyatakan 60% penduduk Jawa berprofesi sebagai petani. Banyaknya penduduk bumiputra yang berprofesi sebagai petani dikarenakan suburnya lahan pertanian saat itu.

Meskipun Hindia-Belanda dikenal dengan kesuburan tanahnya, bukan berarti kebutuhan pangan mereka selalu terpenuhi. Masalah kelangkaan pangan yang terjadi pada abad ke-19 (Fernando, 2010), ternyata terus berlanjut pada abad ke-20. Geertz (1963) mencatat bahwa sejak abad ke-19 banyak lahan subur padi dialihfungsikan menjadi area penanaman tebu. Kelangkaan pangan pada akhirnya menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga mereka mulai beralih ke bahan pangan alternatif.

Tabel 1. Bahan pangan nabati yang dikonsumsi tiap keluarga (dalam kilogram)

Jenis	1913	Rata-rata 1916 - 1924	1930
Padi	102	96	89
Jagung	29	38	45
Singkong	71	134	116

Sumber: *Yayasan Obor, 1987*

Dari tabel di atas, terjadi penurunan konsumsi padi dari tahun 1913, sedangkan konsumsi bahan pangan lain mengalami kenaikan. Jagung dan ketela dipilih karena memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan beras. Paceklik turut berimbas pada penyandang tunanetra di Hindia-Belanda. Saat pertanian tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga mereka mengalami kesulitan keuangan maka tidak ada pilihan lain saat itu selain turun ke jalan untuk mengemis.

Gijsbert de Vries (1939), mengisahkan perjalanan hidup Ibrahim seorang penyandang tunanetra di *Armenkolonie* Blondo, Magelang. Sebelum menjadi penghuni *armenkolonie*, Ibrahim merupakan seorang petani lepas yang karena tidak memperoleh pekerjaan akhirnya terpaksa menjadi pengemis di Pasar Magelang. Menjadi pengemis ternyata bukanlah perkara sepele, saat tidak ada orang yang memberikan uangnya, Ibrahim terpaksa mengais makanan sisa dari keranjang sampah. Selain itu, ia harus menghadapi persaingan dengan pengemis lainnya yang sama-sama penyandang disabilitas. Tidak jarang para pengemis pun harus berkelahi satu sama lain untuk berebut kepingan koin yang diberikan.

B. Munculnya Ide Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas

Memasuki abad ke-20, jumlah penyandang tunanetra tidak mengalami penurunan, malah makin meningkat seiring berjalannya waktu. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya kebijakan yang diperuntukkan untuk para penyandang tunanetra yang telantar. Kesadaran untuk memperbaiki nasib penyandang tunanetra justru datang dari kalangan swasta. Direktur Blindeninstituut Amsterdam¹ H.J. Lenderink, yang terafiliasi dengan loji masonik di Belanda, menjadi tokoh penting dalam munculnya gagasan ini. Ia melihat dari ribuan penyandang tunanetra di Hindia-Belanda, terdapat sekitar 8000 penyandang tunanetra di bawah umur 21 tahun yang seharusnya bisa dididik.

Karena itu, Lenderink pun menyusun proposal pendirian sebuah fasilitas sekolah *boarding* untuk anak-anak penyandang tunanetra di Hindia-Belanda, tanpa memandang ras dan agama yang dianut. Di sekolah itu, para penyandang tunanetra diajarkan pengetahuan umum, membaca huruf braille, bermain musik, dan membuat kerajinan tangan (Lenderink, 1901). Untuk mewujudkan rencana pendirian sekolah penyandang tunanetra itu, ia bekerja sama dengan Dr. C. H. A. Westhoff seorang dokter mata yang berpengalaman di Hindia-Belanda (Wilkens, 1913). Sejak tahun 1884, keduanya telah aktif berdiskusi terkait solusi untuk para penyandang tunanetra telantar.

Setelah melakukan beberapa kali diskusi, muncul ide untuk mendirikan sekolah penyandang tunanetra dan pendirian klinik mata yang melayani pasien miskin. Westhoff ingin mengintegrasikan sekolah penyandang tunanetra itu dengan klinik mata yang diperuntukkan untuk penduduk miskin, sehingga tidak ada lagi kasus penyandang tunanetra telantar tanpa memiliki masa depan. Namun, keduanya sadar bahwa untuk mendirikan institusi itu, membutuhkan dana dan dukungan yang tidak sedikit (*Algemene Secretarie Besluit*, 25 Desember 1910).



Gambar 1. Dr. C. H. A. Westhoff pendiri Blindeninstituut Bandung

Sumber: H. J. Lenderink, Blindeninstituut en de Werkinrichting voor blinde Inlanders te Bandoeng (Instituut tot Onderwijs van Blinden te Amsterdam), 1905

Lenderink menyampaikan ide ini kepada menteri urusan tanah jajahan saat itu Jacob Theodoor Cremer. Ternyata gagasan dari Lenderink mendapatkan sambutan hangat dari Cremer, melalui Cremer pulalah dukungan dari Gubernur Jenderal W. Rooseboom diperoleh. Setelah mendapatkan “lampu hijau” dari Menteri Urusan Koloni dan Gubernur Jenderal, sebuah perkumpulan dibentuk pada tahun 26 April 1901. Perkumpulan tersebut diberi nama *Vereeniging tot Verbetering van het lot der Blinden in Ned. Oost-Indie (VVBNI)* (*De Preanger-Bode*, Senin 22 Juli 1901). Melalui Surat Keputusan Pemerintah No. 9 tahun 1901, VVBNI diberikan wewenang sebagai organisasi otonom resmi yang menaungi sekolah dan penggalangan dana untuk penyandang tunanetra di Hindia-Belanda (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 20 Juli 1901; *Kolonial Verslag*, 1903).

C. Berdirinya Blindeninstituut

Setelah didirikan, VVBNI segera melakukan penggalangan dana untuk pendirian sekolah penyandang tunanetra. Vereeniging tot Verbetering van het tot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën (VVBNI) memberikan modal sebesar f5400; Loge der Vrijmetselaren (Loji Agung Hindia-Belanda) dan Loge Nos Vinxit Libertas memberikan f1000; dan sumbangan f2000 dari Raja Siam Rama V. Uang sebanyak f8400 itu kemudian digunakan untuk mendirikan Blindeninstituut Bandung pada 16 September 1901 (*De Standaard*, Rabu 29 Oktober 1901).

Blindeninstituut berdiri di sebuah rumah kecil sederhana di Jalan Cicendo No. 2 Bandung (*Kolonial Verslag*, 1903). Sekolah penyandang tunanetra ini dikepalai oleh J. W. van Der Zanden seorang guru yang sebelumnya telah berpengalaman mejadi pendidik di Blindeninstituut Amsterdam (*Algemeen Handelsblad*, Sabtu 19 Juli 1902). Dalam waktu cukup singkat, kabar pendirian Blindeninstituut menyebar ke seluruh penjuru Jawa. Kabar tersebut ternyata menarik antusiasme dari penduduk, sehingga jumlah murid yang masuk terus bertambah. Karena murid yang terus bertambah, sekolah akhirnya dipindah ke bangunan yang lebih luas di Jln. Braga. Karena untuk kepentingan sosial, pemerintah kolonial menjual tanah di Jln. Braga dengan harga murah (Lenderink, 1905).

Di bangunan sekolah baru ini terdapat dua macam asrama yang memisahkan penyandang tunanetra Eropa dan bumiputra. Menurut laporan jurnalis *De Preanger Bode* tahun 1911, fasilitas untuk asrama penyandang tunanetra cenderung lebih mewah dibanding asrama bumiputra. Untuk para penyandang tunanetra Eropa yang masih kecil, mereka memperoleh kamar dengan empat tempat tidur di setiap kamarnya. Sementara untuk penyandang tunanetra dewasa, masing-masing disediakan kamar berukuran kecil sendiri lengkap dengan tempat tidur, lemari, meja, dan wastafel (*De Preanger Bode*, 1911).

Sementara itu, asrama untuk penyandang tunanetra bumiputra yang baru diresmikan pada 14 Juli 1903, cenderung lebih sederhana apabila dibandingkan dengan asrama Eropa. Di dalam asrama bumiputra, hanya terdapat dua bangunan asrama besar yang terbuat dari batu bata. Masing-masing asrama memiliki panjang 32 meter dan lebar 8 meter. Bangunan tersebut juga dilengkapi 24 jendela, sehingga sirkulasi udara dapat terjaga. Setiap malamnya para penyandang tunanetra dalam jumlah banyak mencapai ratusan orang tidur bersama-sama (Westhoff, 1911).

Setelah dua asrama kelas resmi beroperasi maka langkah selanjutnya yang diambil oleh perkumpulan adalah mempromosikan sekolah ini. Sebagai lembaga yang terbilang baru, program Blindeninstituut termasuk sering dibahas di koran-koran pemerintah kolonial. Tercatat koran *De Preanger Bode*, *Algemeen Handelsblad*, dan *De Locomotief* menjadi beberapa koran yang aktif mempromosikan program atau penggalangan dana untuk murid penyandang tunanetra.

Upaya untuk mempromosikan sekolah ini melalui surat kabar nampaknya membuahkan hasil. Beberapa pengusaha pada masa itu juga ikut memberikan simpati dan dukungan terhadap sekolah. Tercatat pada tahun 1912, Sultan Langkat, Sultan Bima, dan Pangeran Adipati Mangkubumi Yogyakarta memberikan sumbangan terhadap sekolah. Selain para pemimpin daerah, sumbangan juga datang dari pengusaha gula Oei Tiong Ham. Saat mengunjungi Blindeninstituut untuk melihat kegiatan sekolah itu, ia memberikan sumbangan sebesar f2000 (*“Elfde Jaarverslag”*, 1912).

D. Pendidikan dan Pelatihan bagi Murid Penyandang Tunanetra

Pendirian Blindeninstituut merupakan sebuah inovasi sosial di Hindia-Belanda. Terobosan baru itu bukan hanya dari segi pendidikan penyandang disabilitas, melainkan juga dalam kebijakan publik. Dengan jargon “meningkatkan nasib para penyandang tunanetra, baik anak-anak maupun orang dewasa, terlepas dari keyakinan agama atau kebangsaan mereka,”² penyandang disabilitas yang selama masa kolonial dianggap para pembuat kebijakan sebagai kelas paling rendah, perlahan-lahan mulai diperhatikan haknya sebagai manusia yang sudah sepatutnya memiliki kesempatan untuk berkembang dan mempunyai masa depan.

Sebagai lembaga sosial dan pendidikan, salah satu program yang digalakkan oleh Blindeninstituut adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari penyandang tunanetra yang tengah menempuh pendidikan di sana. Lembaga menjamin kebutuhan pangan para siswanya setiap hari. Untuk operasionalnya, lembaga murni mengandalkan donasi dan penjualan dari produk yang dihasilkan oleh para murid penyandang tunanetra. Bahan makanan menjadi salah satu bentuk donasi yang diterima oleh Blindeninstituut. Para donatur makanan biasanya berasal perusahaan atau penduduk yang memiliki kepedulian terhadap penyandang disabilitas, seperti donasi sayuran dalam jumlah besar dari perusahaan farmasi Rathkamp & Co. (Schoute, 1936).

Gabriel Farell (1956) dalam bukunya *The Story of Blindness*, menjelaskan terdapat tiga organ penting untuk merepresentasikan sesuatu, yakni otak, mata, dan saraf optik. Dari ketiga organ ini, otak menjadi organ paling penting untuk merepresentasikan sesuatu. Tanpa adanya otak yang terlatih, maka kondisi penyandang tunanetra hanya akan semakin memburuk seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, pendidikan dianggap sebagai salah satu solusi utama untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para tunanetra.

Dengan berdirinya Blindeninstituut di Hindia-Belanda maka upaya untuk mendidik penyandang disabilitas khususnya penyandang tunanetra secara resmi dimulai. Pelajaran yang diajarkan tidak jauh berbeda dengan yang diajarkan sekolah umum seperti aritmatika; bahasa; membaca dan menulis huruf braille; bermain musik dan geografi. Materi yang diajarkan disesuaikan dengan kehidupan lingkungan asal mereka, agar setelah lulus mereka dapat kembali dan berkiprah di masyarakat umum.



Gambar 2. Para murid sedang belajar membaca huruf braille

Sumber: "Acht en Dertigste Jaarverslag", Vereeniging tot Verbetering van het lot der Blinden in Ned. Oost-Indie, 1939

Tahun pertama sekolah ini menjadi tahun penting dan menentukan bagi kelanjutan program Blindeninstituut. Pada tahun pertama, lima murid di atas umur 4 tahun diterima di kelas braille. Kelima murid pertama Blindeninstituut belajar langsung dari kepala sekolah Van Der Zenden yang sebelumnya bekerja sebagai guru di Blindeninstituut Amsterdam. Ternyata hasil pembelajaran cukup menjanjikan, dalam waktu 6 bulan salah satu murid bernama Albert Borgerhoff van den Bergh yang berusia 15 tahun, sudah dapat membaca dan menulis huruf braille (Lenderink, 1905).

Pendidikan yang diajarkan di kelas Eropa Blindeninstituut tidak jauh berbeda dibanding sekolah dasar zaman sekarang, bahkan mungkin sedikit lebih kompleks. Pelajaran diberikan mulai hari senin sampai dengan sabtu. Pelajaran bahasa menjadi yang paling dominan dalam kurikulum penyandang tunanetra. Menurut penelitian Kadri dan Deddy Mulyana (2020) berjudul "*Building a Communication Model amongst the Blind: An Ethnographic Study in the Blind Rehabilitation Center 'Wyata Guna', Bandung, Indonesia*", komunikasi verbal berperan penting dalam kehidupan sehari-hari penyandang tunanetra. Selain mengandalkan indra peraba, indra pendengaran penyandang tunanetra yang dikenal tajam berfungsi sebagai indra utama saluran komunikasi.

Kebanyakan guru di Blindeninstituut didatangkan langsung dari Eropa, sayangnya gaji para pendidik di Blindeninstituut tidaklah banyak meskipun pelajaran yang mereka berikan beragam. Banyak dari mereka mengajar di sekolah ini lebih karena motivasi kemanusiaan. Untuk bertahan di Hindia-Belanda, banyak dari mereka pun juga melakukan pekerjaan sampingan, seperti guru musik J. Tombrink yang membuka jasa sebagai pianis di koran (*De Preanger Bode*, 30 Agustus 1905).

Seiring berjalannya waktu kelas Eropa terus mengalami perkembangan, namun Westhoff berupaya mewujudkan pendirian sekolah penyandang tunanetra untuk bumiputra seperti yang sudah ia cita-citakan sebelumnya. Banyaknya jumlah penyandang tunanetra di Hindia-Belanda menjadi salah satu alasan utamanya. Sayangnya karena keterbatasan dana dan rumitnya perizinan menyebabkan kelas penyandang tunanetra bumiputra baru dapat diwujudkan pada tahun 1903 sempat terhambat 2 tahun setelah pendirian Blindeninstituut (*Bataviasch Nieuwsbald*, 20 Maret 1903).

Mata pelajaran kelas untuk penyandang tunanetra bumiputra berbeda dengan kelas Eropa, karena disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tunanetra bumiputra yang kebanyakan telantar dan hidup di tengah kemiskinan sebagai pengemis. Untuk itu di kelas penyandang tunanetra bumiputra, para penyandang tunanetra diajarkan pengetahuan tentang wirausaha, sehingga ketika mereka kembali ke kampung halamannya mereka dapat melanjutkan hidup dengan mandiri (Lenderink, 1905).

Secara administratif, tidak semua penyandang tunanetra dapat diterima di kelas ini, para murid yang diterima harus berusia di atas 10 tahun. Selain itu, hanya mereka yang memiliki keinginan untuk berlatih dan memperbaiki nasib yang diterima. Peraturan pun dibuat, para penyandang tunanetra bumiputra ini diwajibkan meninggalkan kebiasaan lama mereka mengemis di jalanan. Namun, mendidik penyandang tunanetra yang terbiasa hidup di jalan sebagai pengemis bukanlah perkara mudah. Beberapa dari mereka terlalu liar, sehingga sering kali sulit diatur dan sering memberontak. Ada pula yang sulit melepaskan dari kebiasaan lama untuk mengemis. Para pengajar biasanya mencoba memberikan pengarahan kepada penyandang tunanetra yang masih dianggap “liar” ini, tetapi apabila sikap mereka tidak berubah maka pengurus tidak segan mengeluarkan mereka dari Blindeninstituut (“*Negen en Twintigste Jaarverslag*”, 1930).



Gambar 3. Para murid penyandang tunanetra bumiputra tengah berlatih membuat keranjang

Sumber: Southeast Asian & Caribbean Images (KITLV), circa 1910

Kegiatan pelatihan wirausaha di Blindeninstituut tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual, melainkan merupakan bentuk dari model “kewirausahaan sosial,” yakni usaha untuk menciptakan inovasi sosial yang bertujuan untuk memenuhi mengatasi permasalahan sosial. Di bawah bimbingan Mas Asmajoea (guru pertama penyandang tunanetra bumiputra) yang dilanjutkan oleh Sastraatmadja, mereka dilatih berbagai keterampilan yang mengandalkan indra peraba, seperti membuat tikar, membuat keranjang batu bara, membuat keranjang, membuat tikar, membuat sikat, membuat sapu, dll. Kerajinan yang mereka buat pun tidak sembarangan karena mereka diajarkan semua proses produksi. Pertama para siswa diajarkan cara mengolah dan memilah bahan baku mentah yang baik, selanjutnya proses produksi, terakhir kontrol kualitas hasil produksi agar barang dapat diterima konsumen (“*Vijftiende Jaarverslag*”, 1919).

Menurut ahli terapi okupasi, Florence Ash (1940), kegiatan pelatihan untuk penyandang tunanetra mempunyai manfaat untuk mengembangkan kemampuan jari mereka yang sebelumnya jarang digunakan. Setiap materi pelatihan pun memiliki fungsi masing-masing, seperti menenun yang berguna untuk mengasah akurasi dan kerapian, sedangkan membuat keranjang mengasah konsentrasi para penyandang tunanetra. Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan otak, kemampuan indera peraba, dan mental para penyandang tunanetra dapat berkembang.

Setelah mengikuti pelatihan selama satu tahun, para murid di Blindeninstituut yang sudah terlatih akan mendapatkan sertifikat dan diharapkan dapat kembali ke desa/kampung asal mereka. Dalam waktu 10 tahun setelah pendiriannya, Blindeninstituut telah menerima 1.147 siswa dan meluluskan 1.000 penyandang tunanetra (*"Achtste Jaarverslag,"* 1909). Jumlah alumni Blindeninsituut Bandung terus bertambah, seiring dengan semakin banyaknya murid yang masuk sebagaimana yang terlihat di tabel 2.

Tabel 2. Jumlah murid di Blindeninstituut Bandung

Tahun	Jumlah Murid
1901	5
1913	196 (34 kelas braille dan 162 kelas pelatihan bumiputra)
1938	601 (36 kelas braille dan 565 kelas pelatihan bumiputra)

Sumber: Het Nieuws van Den Dag, Jumat 9 Mei 1913; Vereeniging tot Verbetering van het lot der Blinden in Ned. Oost-Indie, "Zeven en Dertigste Jaarverslag", 1938

Untuk mendukung para penyandang tunanetra yang sudah kembali ke kampung halamannya dan memulai usaha kecil, Blindeninstituut hanya menerima pembelian jumlah besar dari perusahaan-perusahaan seperti Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS), Staatsspoorwegen (SS), Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), perusahaan swasta, dan militer. Sementara untuk perdagangan dalam jumlah kecil diperuntukkan untuk para alumni yang menjual produknya di kampung-kampung mereka (*"Achtste Jaarverslag,"* 1909).

Untuk mempromosikan hasil produksi para penyandang tunanetra, Blindeninsituut mengikuti berbagai pameran. Namun, pameran terbesar yang pernah diikuti oleh Blindeninstituut adalah pameran di Brussel pada 1910. Pameran ini tidak hanya dikunjungi oleh pejabat kolonial, tetapi juga dilihat langsung oleh Ratu Belanda (Bloembergen, 2001). Di semua pameran itu barang-barang karya para penyandang tunanetra bumiputra, seperti sapu, sikat, keset, hingga tikar dipamerkan ke publik. Penghargaan yang mereka terima pun menjadi bukti sambutan positif atas partisipasi lembaga itu.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada abad ke-20, kebijakan isolasi dan institusionalisasi menjadi kebijakan utama pemerintah kolonial untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut berlandaskan pada pandangan bahwa penyandang disabilitas merupakan simbol dosa dan beban sosial. Lewat pandangan itu, pemerintah kolonial melegitimasi penempatan penyandang disabilitas di panti sosial dan rumah sakit.

Gagasan paling awal untuk memperbaiki taraf hidup dan memberdayakan penyandang disabilitas di Hindia-Belanda datang dari kalangan swasta pada akhir abad ke-19. Munculnya ide tersebut merupakan bentuk respons terhadap kurangnya porsi kebijakan pemerintah kolonial terhadap nasib kelompok disabilitas. Pada saat yang sama, Jawa sedang dilanda bencana kebutaan akibat penyakit trakom yang menyebabkan ribuan penduduk bumiputra kehilangan penglihatannya.

Pendirian Blindeninstitut pada 1901 merupakan inovasi sosial di Hindia-Belanda karena sebelumnya belum ada sekolah yang diperuntukkan untuk mendidik penyandang disabilitas di negeri ini. Sebagai buah dari sebuah gerakan inovasi sosial, dalam operasionalnya Blindeninstitut tidak mengandalkan subsidi dari pemerintah kolonial, melainkan dana diperoleh dari sumbangan para donatur. Model pendanaan ini menjadikan Blindeninstitut berbeda dari kebanyakan sekolah-sekolah umum yang didirikan pada masa awal politik etis.

Inovasi sosial lain terlihat dalam kurikulum khusus untuk penyandang tunanetra. Blindeninstitut dibagi menjadi dua kelas, yakni kelas Eropa dan bumiputra. Dua kelas penyandang tunanetra tersebut memiliki kurikulum yang berbeda. Di kelas Eropa, para penyandang tunanetra Eropa dan golongan elite berumur di atas 4 tahun diberikan pendidikan layaknya sekolah dasar, tetapi pelajaran komunikasi lebih ditekankan karena hal ini menjadi paling vital untuk mereka.

Sementara itu di kelas penyandang tunanetra bumiputra yang diresmikan pada 1903, para penyandang tunanetra berusia di atas 10 tahun dilatih keterampilan wirausaha, mulai dari metode pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran. Setelah lulus, para penyandang tunanetra diberikan sertifikat dan diperbolehkan memulai bisnis di kampung halamannya. Tujuan dari pelatihan di kelas ini adalah memberikan kemampuan wirausaha bagi para penyandang tunanetra, sehingga mereka dapat mengatasi berbagai masalah sosial dan dapat terintegrasi dengan masyarakat umum.

B. Saran

Posisi penyandang disabilitas di dalam historiografi Indonesia sama marjinalnya dengan posisi mereka di kehidupan nyata. Mereka sering kali diabaikan dari narasi besar sejarah Indonesia, seolah-olah mereka bukanlah bagian dari bangsa ini. Tulisan ini hanya kepingan kecil dari sejarah penyandang disabilitas di Indonesia yang perlu untuk dilengkapi. Melalui penelitian tentang penyandang disabilitas pada masa lalu, diharapkan dapat memberikan sumbangan penting dalam pengambilan kebijakan pada masa sekarang, sehingga impian untuk menciptakan kehidupan inklusif bagi kelompok ini dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Cetakan Resmi

Kolonial Verslag. 1903.

_____. 1904.

Lenderink, H. J. (1901). *De blinden in onze kolonien en de middelen ter verbetering van hun toestand*. Instituut tot Onderwijs van Blinden te Amsterdam.

_____. (1904). *Het blindenwezen in en Buiten Nederland*. W. Gosler & Co.

_____. (1905). *Blindeninstituut en de werkinrichting voor blinde inlanders te Bandoeng*. Instituut tot Onderwijs van Blinden te Amsterdam.

Mensch, C. (1937). *Taboe een primitieve vreesreactie*. H. J. Paris.

Persknaire, J.B.C. (1898). Het trachoom te Gombong. *Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, Vol. 38.

Schoute, D. (1934). De geneeskunde in Nederlandsch-Indië gedurende de negentiende eeuw. *Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, Vol. 74 No. 26, 1698-1776.

Steiner, L. (1894). De blindheid ondee de Javanen, hare menigvuldigheid en oorzaken. *Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, Vol. 34.

Vereeniging tot Verbetering van het lot der Blinden in Ned. Oost-Indie. (1909). *Achtste Jaarverslag*. Landsdrukkerij.

_____. (1912). *Elfde Jaarverslag*. Landsdrukkerij.

_____. (1919). *Vijftiende Jaarverslag*. N.V. Mij Vorkink.

_____. (1930). *Negen en Twintigste Jaarverslag*. N.V. Mij Vorkink.

_____. (1938). *Zeven en Dertigste Jaarverslag*.

_____. (1939). *Acht en Dertigste Jaarverslag*.

Westhoff, C. H. A. (1911). *Het tienjarig bestaan van de vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederlansch Oost-Indie*. Javasche Boekhandel & Drukkerij.

Wilkins, J. A. (1913). In memoriam Dr. C. H. A. Westhoff. *Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, Vol. 53.

Buku dan Artikel Jurnal

Ash, F. (1940). The value of handicraft for the retarded blind. *Occupational therapy & rehabilitation*, Vol. 19, No. 5, 339-344.

Bloembergen, M. (2001). Koloniale vertoningen: de verbeelding van Nederlands-Indië op de wereldtentoonstellingen (1880-1931). *Disertasi*. Amsterdam Institute for Social Science Research.

- Carey, P. (2014). A mischievous young rogue and a dwarf: Reflections on the role of the panakawan in the Age of Prince Diponegoro (1785-1855). *IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1), 71-75. <https://ijds.uib.ac.id/index.php/ijds/article/view/12/9>.
- Conrad, P. (1992). Medicalization and social control. *Annual Review of Sociology*, 18, 209-232. <http://www.jstor.org/stable/2083452>.
- Creutzberg, P. dan van Lannen, J.T.M. (1987). *Sejarah statistik ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Farell, G. (1956). *The story of blindness*. Harvard University Press.
- Kadri, K., & Mulyana, D. (2020). Building a communication model amongst the blind: An ethnographic study in the blind rehabilitation center 'Wyata Guna', Bandung, Indonesia. *Journal of Creative Communications*, 15(3), 342-353. <https://doi.org/10.1177/0973258620924951>
- Murray, R., Cauiler, J., dan Mulgan, G. (2010). *The open book of social innovation: Ways to design, develop, and grow social innovations*. London: The Young Foundation.
- Nirje, B. (1969). The normalization principle and its human management implications. Dalam R. B. Kugel & W. Wolfensberger (Ed.), *Changing patterns in residential services for the mentally retarded chapter*. President's Committee on Mental Retardation.
- Oliver, M. J. (1999). Capitalism, disability, and ideology: A materialist critique of the normalization principle. Dalam Robert J. Flynn dan Raymond A. Lemay, *A quarter-century of normalization and social role valorization*. University Ottawa Press.
- Pelka, F. (2012). *What we have done: An oral history of the disability rights movement*. University of Massachusetts Press.
- Pol, E. & Ville, S. (2009). Social innovation: buzz word or enduring term? *The Journal of Socio-Economics*, 38 (6), 878-885.
- Pols, H. (2006). The development of psychiatry in Indonesia: from colonial to modern times. *International review of psychiatry (Abingdon, England)*, 18(4), 363-370.
- Pols, H. dan Wibisono, S. (2017). Psychiatry and mental health care in Indonesia from colonial in modern times. Dalam Harry Minas (Ed.), *Mental health in Asia and the Pacific: historical and cultural perspectives*. Springer.
- Porath, N. (2008). The naturalization of psychiatry in Indonesia and its interaction with indigenous therapeutics. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde*, 164(4), 500-528. <http://www.jstor.org/stable/27868521>
- Praag, L. L. Van (1942). The blind in the Netherlands East Indies. *Outlook for the blind and the teachers forum*, Vol. 36 No. 1, 1942. Hlm. 82-85. doi:10.1177/0145482X4203600205
- Rivai, A. (1905). *Memiara mata*. G. J. Thieme.
- Russel, M. dan Maholtra, R. (2002). Capitalism and disability. *Socialist register 2002: A world of contradictions*, Vol. 38, 2009, 212-228.
-

Sardegna, J. (2002). *The encyclopedia of blindness and vision impairment*. Facts on File, Inc.

Swinton, J. (2011). Disability, ableism, and disablism. Dalam B. J. Miller-McLemore (Ed.), *The wiley-blackwell companion to practical theology*. Wiley Blackwell Publishing Limited.

Till, M. van. (1995). Social care in Eighteenth-Century Batavia the poorhouse, 1725–1750. *Itinerario*, 19(1),18–31. <http://doi.org/10.1017/S016511530002115X>

Surat Kabar

Algemeen Handelsblad, Sabtu 19 Juli 1902.

De Preanger-bode, 30 Agustus 1905.

De Nieuwe Vorstenlande, 1904.

De Preanger Bode, 1911.

De Standaard, Rabu 29 Oktober 1901

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 20 Juli 1901.

Het Nieuws van Den Dag, 17 Oktober 1904.

Stroer, Carel J. “Het Blinden Instituut te Amsterdam”, *Op de Hoogte*, Juli 1918.

1 Blindeninstituut Amsterdam diprakarsai oleh loji masonik di Belanda. Tujuannya untuk memberikan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, tanpa memandang ras, agama, dan etnis; sehingga mereka dapat terintegrasi ke dalam masyarakat dan memiliki masa depan. Carel J Stroer, “Het Blinden Instituut te Amsterdam”, *Op de Hoogte*, Juli 1918.

2 Tujuan ini termuat dalam anggaran dasar no. 3 dari lembaga. *De Preanger Bode*, Sabtu 17 Mei 1902.
